



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Musi Rawas “MURA MANTAB 2026” “Terwujudnya Musi Rawas Lebih Maju Mandiri dan Bermartabat”.

Muara Beliti,

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,



SUNARDIN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651009 198701 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....	18
3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan.....	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
BAB V PENUTUP.....	25





**RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023  
BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Musi Rawas tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi Musi Rawas yaitu :“ **MURA MANTAB 2026**”.

Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2026 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maka “**visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Lebih Maju, Mandiri dan Bermartabat**”

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu strategi yang ditempuh adalah :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam MPP.
6. Meningkatkan Inovasi layanan Perizinan Online.
7. Meningkatkan layanan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik.





Kebijakan adalah arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi padaseluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
4. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat;
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam MPP
7. Membuat inovasi-inovasi tentang pelayanan perizinan online untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam melayani setulus hati.
8. Membuat perjanjian kerja sama dalam instansi terkait baik verbal maupun horizontal dalam pelayanan public yang terintegrasi dalam 1 gedung MPP.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2023:

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 – 2025
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah





6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rancangan pembangunan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.





18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk:

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kab Musi Rawas.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi Kinerja Tahunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi daerah sekarang dalam konstelasi regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### **1.1. Latar Belakang**

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang





SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Renstra PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022 sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, ,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan PP No 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing PD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan , penjelesaian mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan dan program dan kegiatan





baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Telaah terhadap kebijakan nasional dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD

#### **3.3. Program dan Kebijakan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.





## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terawas Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran tahunan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan prediksi tahun 2023.

Anggaran tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 5.592.293.383,- dengan 6 program 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.106.344.710,- per Desember 2022 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,31 % yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dari alokasi anggaran sebesar Rp. **4.861.639.383** terealisasi sebesar Rp. **4.532.519.414** atau 93,23 %.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari alokasi anggaran sebesar Rp. **50.000.000** terealisasi **48.625.200** atau 97,25 %
3. Program Promosi Penanaman Modal dari alokasi anggaran sebesar Rp. **120.000.000** terealisasi sebesar Rp. **119.893.600** atau 99,91 %.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dari alokasi anggaran sebesar Rp. **100.000.000** terealisasi sebesar Rp. **70.897.700** atau 70,90 %.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari alokasi anggaran sebesar Rp. **165.000.000** terealisasi sebesar Rp. **161.065.774** atau 97,62 %
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dari alokasi anggaran sebesar Rp. **64.000.000** terealisasi sebesar Rp. **60.255.709** atau 94,15%.





Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp. 3.446.339.796,- terurai dalam 6 program 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi fisik maupun keuangan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya dalam bidang perizinan dan penanaman modal. Adanya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik yang merujuk pada Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi sehingga perlu adanya pengadaan jaringan aplikasi system perizinan online dan sarana yang mendukung lainnya.
- c. Pembutan peta investasi sebagai data investasi di kabupaten Musi Rawas yang masih perlu dikembangkan.
- d. Belum memadainya sarana penunjang dalam meninjau lokasi perusahaan yang akan membuat ijin lokasi.
- e. Masih adanya keterlambatan dalam pengumpulan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- f. Masih kurangnya koordinasi antar pihak terkait.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin usaha maupun izin lainnya secara legal.





- h. Masih minimnya sapras dalam Pelayanan di dalam MPP Kabupaten Musi Rawas.

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

1. Presentase Perda/Perbub yang mendukung berinvestasi
2. Persentase peningkatan konten promosi daerah
3. Persentase izin investasi yang terbit
4. Persentase perusahaan yang patuh terhadap aturan berinvestasi

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah maka kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas diukur dengan indicator sebagai berikut :

1. Presentase Perda/Perbub yang mendukung berinvestasi
2. Persentase peningkatan konten promosi daerah
3. Persentase izin investasi yang terbit
4. Persentase perusahaan yang patuh terhadap aturan berinvestasi

Capaian Kinerja tersebut disesuaikan dengan Misi ke-4 Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

## **2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD**

Nilai Capaian secara umum adalah baik, hal tersebut disebabkan di setiap tahapan sebagian rencana terealisasi dengan baik.

Dalam sasaran kebijakan dan program yang berkualitas dengan pelaksanaan seluruh kegiatan nilai capaian kinerjanya 91,31 % per desember 2022 secara umum sasaran telah tercapai dengan baik, hal tersebut disebabkan karena anggaran yang tersedia tersebut terpenuhi secara optimal dan rencana kerja terealisasi dengan baik. Untuk Tahun berikutnya akan ditingkatkan kualitas Sumber





Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta keberdayaan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebijakan yang akan di tempuh.

Adapun isu strategis yang mempengaruhi pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yakni persentase kenaikan Investasi PMDN dan PMA berupa :

a. Meningkatnya Produk hukum yang mendukung Investasi dipengaruhi oleh faktor :

a) Adanya kajian kebijakan Penanaman Modal yang mendukung Investasi :

- Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )
  - Tersedianya Kajian Naskah Akademik RUPM
  - Tersedianya Dokumen RUPM
- Tersedianya Perbub atau Perda tentang Penanaman Modal
- Tersedianya Perbub atau Perda tentang Izin berinvestasi

b) Evaluasi reguasi perizinan yang berpihak pada investor

b. Adanya minat Investor berinvestasi :

- Ketersediaan potensi daerah
  - Tersediannya kajian potensi daerah
    1. Tersedianya informasi potensi daerah yang potensial
      - Tersedianya SIPID (sistem informasi potensi investasi Daerah) online
    2. Tersediannya Potensi wisata Musi Rawas
      - Tersediannya pendataan Potensi wisata Musi Rawas
      - Tersedianya Wisata Unggulan Musi Rawas
    3. Tersediannya Potensi Perkebunan
      - Tersediannya lahan potensial perkebunan untuk di investasi
      - Tersedianya Perkebunan yang potensial
    4. Tersediannya Produk Unggulan
      - Tersediannya Pendataan Produk unggulan
      - Tersedianya Produk Khas Musi Rawas
    5. Tersediannya Potensi Pertanian
      - Tersediannya Pendataan Produk Hasil Pertanian
      - Tersedianya Produk Unggulan Pertanian





6. Tersediannya Potensi Perikanan
  - Tersediannya Pendataan potensi perikanan
  - Tersedianya produk olahan dari ikan
7. Tersediannya Potensi Peternakan
  - Tersediannya Pendataan hasil ternak unggulan
  - Terpenuhinya kebutuhan ternak di musi rawas
- Tersedianya Profil Investasi Daerah
  1. Tersedianya data investasi daerah
  2. Tersedianya buku profil investasi
- Tersedianya Selayang Pandang Daerah
  1. Tersedianya pendataan Selayang Pandang Daerah
  2. Tersedianya buku Selayang Pandang Daerah
- Ketersediaan Infrastruktur Daerah
- Ketersediaan Publikasi Promosi
  - Terselenggaranya pameran investasi
  - Tersedianya layanan Promosi Daerah melalui media
    1. Tersedianya Promosi investasi melalui media sosial
    2. Tersedianya Promosi investasi melalui media massa
  - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi
    1. Tersedianya Gedung Mall Layanan Publik
    2. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Layak
      - Tersedianya Filing Kabinet
      - Tersedianya Lemari Pajangan
      - Tersedianya Rak Buku
      - Tersedianya Lemari Etalase
      - Tersedianya Kursi Tamu
      - Tersedianya Sopa Tamu
      - Tersedianya Kursi Tunggu
3. Tersedianya Sarana dan prasarana Wisata yang menarik untuk di Kunjungi
4. Tersedianya Sarana dan prasarana transportasi





- c. Adanya daya saing Daerah :
- Meningkatnya Kajian Kebijakan Penanaman Modal yang Mendukung Investasi
  - Ketersediaan Infrastruktur Daerah
  - Meningkatnya kualitas SDM
- d. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam berinvestasi
- Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal
    - Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usahal
  - Ketersediaan Layanan penanganan permasalahan pengaduan masyarakat
    - Ketersediaan Ruang Layanan pengaduan publik
    - Ketersediaan Prosedur Layananan Pengaduaan
    - Ketersediaan TIM Layananan Pengaduaan
    - Ketersediaan Layananan Penyelesaian Komplik Masyarakat Bersama
- e. Meningkatnya kemudahan layanan perizinan berinvestasi
- Tersedianya SDM yang berkompeten
    - Ketersediaan Pegawai yang terlati dalam Pelayanan
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat PTSP
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat OSS
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat SICANTIK CLOUD
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Promosi
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat sistem pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Penanaman Modal
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung layanan investasi
    - Tersedianya Lokasi Gedung yang Mudah
    - Tersedianya Akses Jalan Yang Mudah dilalui
    - Tersedianya jalur layanan yang rama bagi kaum Dissabilitas
    - Tersedianya Ruang layanan
    - Tersedianya Ruang Konsultasi Pelaku Usaha
    - Tersedianya Ruang Pelayanan





- Tersedianya Ruang Laktasi
- Tersedianya WC Tamu
- Tersedianya layanan yang terintegrasi dalam 1 gedung MPP
- Tersedianya regulasi pelayanan yang memudahkan investasi
  - Tersedianya SOP
  - Tersedianya Standar Pelayanan
  - Tersedianya Maklumat Pelayanan
  - Tersedianya Alur Pelayanan
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang Perizinan Online
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang e- signature
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Tersedianya penerapan informasi teknologi (perizinan investasi secara online)
  1. Tersedianya Hardware
    - Tersedianya Jaringan telekomunikasi Internet
    - Tersedianya Komputer PC
    - Tersedianya Laktop
    - Tersedianya Genset
    - Tersedianya Barcode
    - Tersedianya Printer
    - Tersedianya Scanner
  2. Tersedianya Software
    - Tersedianya Aplikasi Perizinan Online
      - Tersedianya Aplikasi OSS( Online Single Submissoin )
      - Tersedianya Aplikasi SiCANTIK CLOUD
    - Tersedianya Aplikasi Inovasi Perizinan Online
      - Tersedianya Aplikasi SMS Gateway
      - Tersedianya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
      - Tersedianya Aplikasi Kadaluarsa Izin
      - Tersedianya Aplikasi E- Digital Arsip Perizinan





- Tersedianya Layanan Pojok Online pendampingan pelaku usaha
3. Tersedianya maintenance
    - Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
    - Tersedianya Upgrading Website yang terintegrasi dengan Aplikasi Perizinan

Berdasarkan Isu Strategis tersebut yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yakni :

a. Potensi Lingkungan Internal

1. Landasan Hukum Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
2. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
3. Adanya Komitmen Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan yang cepat, tepat dan berkualitas.
4. Jumlah aparatur SDM aparatur yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana kerja
6. Tersedianya Aplikasi Online Perizinan berupa OSS dan Sicantik CLOUD
7. Tersedianya layanan Inovasi Perizinan Online
8. Tersedianya gedung MPP Kabupaten Musi Rawas

b. Permasalahan Lingkungan Internal

1. Kompetensi dan kualitas SDA masih terbatas
2. Prasarana gedung kantor masih kurang memadai
3. Sarana dan prasarana yang mendukung Perizinan Online masih terbatas
4. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja.

c. Potensi Lingkungan Eksternal

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Tuntutan reformasi birokrasi pelayanan public agar dapat memberikan pelayanan cepat mudah dan terukur.





3. Harmonisasi antar OPD terkait dalam mendukung penyajian data potensi Daerah dan produk unggulan Musi Rawas
- d. Permasalahan Lingkungan Eksternal
  1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
  2. Perubahan lingkungan strategis;
  3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan Online OSS dan Sicantik CLOUD dengan mengintegrasikan dalam website DPMPTSP sehingga memudahkan dalam pelayanan perizinan Online
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset





Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 91,31 % tahun 2022 dengan penilaian yang dinilai baik akan tetapi hal tersebut tak luput dari adanya kelemahan dan masalah yang dihadapi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Adapun analisis lingkungan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Musi Rawas

**1. Kekuatan / Strength ( S )**

- a. Tersedianya pranata hukum yaitu Perda, SK. Bupati, Peraturan Bupati, dan peraturan hukum lainnya.
- b. Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Tersedianya aparatur (SDM) pelayanan perizinan dengan jumlah yang memadai

**2. Kelemahan / Weaknessess ( W )**

- a. Kemampuan Teknis yang dimiliki SDM Perizinan belum optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan perizinan.
- c. Terbatasnya anggaran dana untuk mendukung kegiatan operasional

**3. Peluang / Opportunities ( O )**

- a. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan usaha masyarakat.
- c. Adanya minat pengusaha yang akan menanamkan modalnya.
- d. Tingginya kemauan masyarakat / pengusaha untuk mengurus izin.

**4. Ancaman/ Threats ( T )**

- a. Luasnya Lingkup Kerja Instansi.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan izin.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau mencari izin.
- d. Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin.





Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja diupayakan strategi pemecahaannya yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu melalui pendidikan dan pelatihan
2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sehingga memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya diupayakan beberapa strategi antara lain:
  - a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu, dan hasil sesuai dengan target kerja;
  - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah tersedia;
  - c. Optimalisasi gedung MPP dalam integrasi Pelayanan Publik;
3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dengan instansi terkait diupayakan strategi yakni menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam legalitas usaha dilakukan sosialisasi dalam perizinan

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan proses penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif.

#### **2.5. PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**





### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Ada beberapa kebijakan nasional yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun tujuan, sasaran dan program kegiatan. Untuk program yg ada di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dengan kebijakan nasional terdapat :

- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dan Kabupaten Musi Rawas
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perludilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan Organisasi Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2026 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maka **“visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Lebih Maju, Mandiri dan Bermartabat”**. Dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 terdiri dari :

- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dan Kabupaten Musi Rawas
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran renja ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA OPD DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023**

URUSAN : Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal  
NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			Perkiraan Maju 2024 (Rp)	Jenis Program & Kegiatan	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET	
						Tolak Ukur	Target Angka	Satuan						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	Persentase	11.800.947.713	12.761.042.484				
2	18.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Persentase cakupan administrasi perencanaan dan evaluasi	100	Persentase	345.000.000	379.500.000				
2	18.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	45.000.000	49.500.000	Baru	APBD	DPMPPTSP	
2	18.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	Baru	APBD	DPMPPTSP	
2	18.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	Baru	APBD	DPMPPTSP	
2	18.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	Baru	APBD	DPMPPTSP	
2	18.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	50.000.000	55.000.000	Baru	APBD	DPMPPTSP	
2	18.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	50.000.000	55.000.000	Baru	APBD	DPMPPTSP	
2	18.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Persentase cakupan layanan administrasi keuangan	100	Persentase	3.037.055.223	3.340.760.745				



UR S A N G N	P R O G R A M	K E G I A T A N	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET					
							Tolak Ukur	Target Angka	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)			Perkiraan Maju 2024 (Rp)	Jenis Program & Kegiatan	Sumber Dana		
2	18 01	2.02	01	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintahan	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	30	Orang ASN	2.833.412.483	3.116.753.742	Baru	APBD	DPMPTSP			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintahan	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Tersedianya Jasa Pengelola Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	5	orang	143.842.730	158.007.003	Baru	APBD	DPMPTSP			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintahan	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Tersedianya Laporan Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Dokumen	60.000.000	66.000.000	Baru	APBD	DPMPTSP			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintahan	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100	Persentase	60.000.000	66.000.000						
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintahan	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	60.000.000	66.000.000	Baru	APBD	DPMPTSP			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Kompetensi ASN	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100	Persentase	340.278.620	374.306.482						
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya Kompetensi ASN	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah pegawai dan Non Pegawai	20	Orang	340.278.620	374.306.482	Baru	APBD	DPMPTSP			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Persentase cakupan urusan penunjang yang terpenuhi	100	Persentase	1.092.835.000	1.202.118.500						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah komponen alat listrik dan instalasi listrik yang tersedia	15	Jenis	120.000.000	132.000.000	Baru	APBD	DPMPTSP			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi	DPM-PTSP Kab. Musi Rawas	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana sesuai RKBM dan aturan PBJ	21	Unit	368.835.000	405.718.500	Baru	APBD	DPMPTSP			





Renja juga memberikan Umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Musi Rawas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,



**Sulwardin, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651009 198701 1 001